

Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Peminggiran Sosial Masyarakat Urban (Studi pada PKL di Pantai Tedis Kota Kupang)

Selviana Selan¹, Resta Tasuib², Lasarus Jehamat^{*3}, Hotlif A. Nope⁴, Helga M. Evarista Gero⁵, Christine E. Meka⁶

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana

^{3,4,5,6} Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana

Email¹: selviselan18@gmail.com Email²: tasuibresta@gmail.com

Email³: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id Email⁴: hotlifnope@staf.undana.ac.id

Email⁵: gerohelga26@gmail.com Email⁶: christine.e.meka@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pembangunan inklusif dalam mengurangi sosial eksklusif, dengan studi kasus pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Tedis, Kota Kupang. Pembangunan inklusif didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan pemerataan kesempatan bagi semua kelompok masyarakat, khususnya yang terpinggirkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL di Pantai Tedis menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses ruang usaha dan modal. Namun, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mendukung, termasuk penyediaan fasilitas dasar dan partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, pendekatan pembangunan inklusif menciptakan peluang bagi PKL melalui pemberdayaan ekonomi dan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam perekonomian lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan inklusif berkontribusi positif dalam mengurangi sosial eksklusif dengan memberdayakan PKL, meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya, serta mengintegrasikan mereka dalam perencanaan kota. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan regulasi yang mendukung dan memastikan partisipasi PKL dalam setiap tahap pembangunan.

Kata kunci: pembangunan inklusif, sosial eksklusif, pedagang kaki lima, Pantai Tedis, Kota Kupang

Inclusive Development as an Initiative to Alleviate the Social Exclusion of Urban Communities (Study on Street Vendors in Tedis Beach, Kupang City)

Abstract

This research discusses the role of inclusive development in reducing social exclusion, with a case study of street vendors in Tedis Beach, Kupang City. Inclusive development is an approach that emphasizes equal opportunities for all groups of society, especially the marginalized. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that street vendors in Tedis Beach face various challenges, such as limited access to business space and capital. However, the government has implemented supportive policies, including providing basic facilities and participation in development. In addition, the inclusive development approach creates opportunities for street vendors through economic empowerment and recognition of their contribution to the local economy. This research concludes that inclusive development positively reduces social exclusion by empowering street vendors, improving access to resources, and integrating them into urban planning. Recommendations are given to enhance regulations that support and ensure street vendors' participation in every development stage.

Keywords: *inclusive development, social exclusion, street vendors, Tedis Beach, Kupang City.*

Korespondensi: *(Lasarus Jehamat, S. Sos, MA) Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang, Email: lasarus.jehamat@staf.undana.ac.id*

PENDAHULUAN

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang berkembang pesat. Namun, percepatan pembangunan sering kali meninggalkan kelompok masyarakat tertentu dalam kondisi rentan, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena sosial exclusion atau peminggiran sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam proses urbanisasi yang terjadi di kota ini. PKL, meskipun berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal, sering diabaikan dalam perencanaan kota. Mereka menghadapi berbagai masalah, seperti akses terbatas terhadap fasilitas publik, ruang usaha yang layak, dan perlindungan hukum. Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang inklusif, yang mampu mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat dalam manfaat pembangunan. Oleh karena itu, kajian tentang pembangunan inklusif menjadi relevan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi semua pihak.

Eksklusi sosial sering kali dipandang sebagai dampak yang tak terhindarkan dari pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Menurut Silver dan Miler (2010), eksklusi sosial terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat kehilangan akses ke hak-hak dasar mereka. PKL di Pantai Tedis, Kupang, menghadapi kondisi ini, terutama dalam hal pengakuan formal dan dukungan kebijakan yang memadai. Meskipun menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi lokal, keberadaan mereka sering kali dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan kebijakan kota untuk mengakomodasi sektor informal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti bagaimana eksklusi sosial dapat diatasi melalui penerapan pembangunan inklusif. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk PKL, memiliki kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan inklusif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Menurut Sundaryanto (2019), pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam konteks Kota Kupang, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PKL. Dengan menyediakan fasilitas yang layak, pelatihan kewirausahaan, dan perlindungan sosial, PKL dapat diberdayakan untuk menjadi bagian integral dari perekonomian kota. Pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik antara pemerintah dan PKL terkait penataan ruang kota.

PKL di Pantai Tedis telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kupang. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas terhadap modal usaha dan ruang berjualan yang memadai. Kebijakan yang inklusif diperlukan untuk mendukung mereka, seperti penyediaan ruang usaha yang terorganisir dan pengurangan regulasi yang memberatkan. Selain itu, pendekatan pembangunan inklusif juga melibatkan partisipasi PKL dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, PKL dapat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kota sekaligus mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan. Sebagai contoh, program pelatihan kewirausahaan dapat membantu mereka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembangunan inklusif dapat diterapkan dalam mengurangi eksklusi sosial di kalangan PKL di Pantai Tedis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali perspektif PKL, pemerintah, dan masyarakat tentang manfaat serta tantangan pembangunan inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pembangunan inklusif serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di Kota Kupang. Dengan demikian, pembangunan inklusif adalah solusi yang menjanjikan untuk mengatasi eksklusi sosial, terutama di tengah dinamika urbanisasi yang terus berlangsung.

Review of Literature

Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif menekankan pemerataan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui akses yang setara terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Sundaryanto (2019) menegaskan bahwa pembangunan inklusif memastikan seluruh warga negara menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam konteks urbanisasi, pembangunan inklusif menjadi esensial untuk mengatasi tantangan keadilan sosial dan integrasi kelompok rentan dalam struktur perkotaan. Oleh karena itu, strategi ini memberikan peluang untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan inklusif mencakup pemberdayaan ekonomi, penguatan institusi sosial, dan partisipasi publik. Dengan mengintegrasikan kelompok marginal ke dalam arus utama pembangunan, pendekatan ini menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Sukoco (2020) mencatat bahwa pembangunan inklusif juga mendorong penyediaan fasilitas yang mendukung

integrasi sosial, seperti lokasi usaha yang layak dan pelatihan keterampilan. Hal ini relevan dalam konteks Kota Kupang, di mana eksklusi sosial menjadi tantangan utama. Pembangunan inklusif menjadi cara untuk memastikan bahwa kelompok terpinggirkan, seperti PKL, tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga aktor dalam proses pembangunan.

Pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang adil. Darmawan (2021) menunjukkan bahwa partisipasi kelompok marginal dalam perencanaan kebijakan merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini. Di Kota Kupang, PKL di Pantai Tedis menunjukkan potensi besar jika mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ruang kota. Dengan partisipasi aktif, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan inklusif harus menjadi prioritas dalam kebijakan perkotaan.

Eksklusi Sosial dalam Pembangunan Perkotaan

Eksklusi sosial mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena ini sering menjadi eksese dari pembangunan perkotaan yang tidak merata, khususnya di daerah yang mengalami urbanisasi cepat. Menurut Silver dan Miller (2010), eksklusi sosial mencerminkan ketidakseimbangan akses terhadap hak, sumber daya, dan peluang dalam masyarakat. PKL di Kota Kupang, sebagai kelompok informal, kerap terpinggirkan dari perencanaan kota yang terpusat pada modernisasi. Akibatnya, mereka mengalami tantangan dalam mengakses fasilitas dasar, perlindungan hukum, dan peluang ekonomi.

Eksklusi sosial sering kali menghambat kelompok rentan untuk berkembang secara optimal dalam struktur perkotaan. Dalam konteks

pembangunan inklusif, eksklusi ini harus diatasi melalui pendekatan yang mengutamakan keadilan sosial. Sukoco (2020) menyebutkan bahwa pemerintah perlu menyediakan ruang usaha yang layak dan memastikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Di Pantai Tedis, PKL menjadi contoh bagaimana integrasi mereka ke dalam kebijakan pembangunan kota dapat mengurangi marginalisasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun eksklusi sosial sering dianggap sebagai konsekuensi pembangunan, hal ini dapat dicegah melalui perencanaan yang inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa melibatkan kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah awal untuk mengatasi eksklusi ini. Darmawan (2021) menyoroti bahwa pembangunan inklusif di Kota Kupang telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan akses PKL terhadap fasilitas publik. Dengan demikian, pemerintah perlu terus mengembangkan strategi yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan untuk menciptakan kota yang lebih adil.

Peran Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Pembangunan Kota

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal, terutama di kawasan perkotaan. Mereka menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pasar formal. Namun, keberadaan PKL sering dianggap sebagai tantangan dalam pengelolaan tata ruang kota. Menurut Tahir dan Hidayat (2020), PKL adalah bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, meskipun mereka sering menghadapi diskriminasi dalam kebijakan kota. Oleh karena itu,

pendekatan inklusif diperlukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sistem perkotaan secara lebih teratur.

Pembangunan inklusif memberikan peluang bagi PKL untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di Pantai Tedis, PKL tidak hanya menjadi bagian dari perekonomian tetapi juga mendukung pariwisata dengan menyediakan produk khas lokal. Sukoco (2020) mencatat bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan adalah langkah penting untuk mendukung PKL. Selain itu, melibatkan PKL dalam perencanaan ruang publik juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi mereka dan masyarakat secara umum. Dengan pendekatan ini, PKL dapat berkembang tanpa merasa terpinggirkan.

Selain memberikan kontribusi ekonomi, PKL juga memainkan peran sosial yang signifikan dalam masyarakat. Mereka menciptakan ruang interaksi sosial dan memperkaya identitas budaya lokal, seperti yang terlihat di Pantai Tedis. Darmawan (2021) menyebutkan bahwa pembangunan yang inklusif harus memperhatikan dimensi sosial dan budaya dari keberadaan PKL. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha PKL sambil memastikan integrasi mereka ke dalam visi pembangunan kota yang lebih luas.

Pantai Tedis Kota Kupang

Pantai Tedis, yang terletak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pantai ini sering menjadi tujuan utama bagi wisatawan lokal dan domestik karena keindahan alamnya yang mempesona. Di sekitar pantai, banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan, menawarkan berbagai produk seperti makanan, minuman, souvenir, dan barang lainnya. Namun, meskipun berperan penting dalam menyediakan

barang dan jasa yang terjangkau bagi pengunjung, keberadaan PKL di Pantai Tedis sering kali tidak mendapat pengakuan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap pengusuran dan marginalisasi dalam proses pembangunan kota.

Pemerintah Kota Kupang, meskipun berupaya mengembangkan sektor pariwisata, sering kali menghadapi dilema dalam mengelola ruang publik di Pantai Tedis. Kebijakan pengaturan ruang cenderung lebih fokus pada pengembangan pariwisata formal dan peningkatan citra kota, sementara PKL yang berjualan di sepanjang pantai sering dianggap sebagai gangguan. Hal ini mengarah pada sosial exclusion, di mana PKL tidak hanya terpinggirkan secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan budaya, karena mereka tidak diberikan ruang yang sah untuk menjalankan aktivitas usaha mereka. Padahal, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan menyediakan akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat berpendapatan rendah.

Melalui penerapan pembangunan inklusif, Pantai Tedis bisa menjadi contoh kawasan wisata yang lebih berkelanjutan dan adil. Pembangunan inklusif akan memungkinkan pemerintah untuk memberikan ruang bagi PKL dengan penyediaan fasilitas yang mendukung, seperti tempat berjualan yang sah, sanitasi yang layak, dan akses terhadap layanan umum lainnya. Dengan melibatkan PKL dalam proses perencanaan ruang publik, termasuk dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor informal, sosial exclusion dapat dikurangi, dan PKL dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi tanpa harus terpinggirkan. Pendekatan ini akan menciptakan sebuah ekosistem yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat di Pantai Tedis, menciptakan ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial terkait pembangunan inklusif dan upaya mereduksi eksklusi sosial di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Tedis, Kota Kupang. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan area strategis dengan banyak PKL yang aktif beroperasi, memberikan gambaran yang relevan terhadap topik kajian. Informan penelitian dipilih secara purposif, yakni mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait aktivitas PKL di wilayah ini. Pendekatan ini mengacu pada pandangan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007), yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas PKL di Pantai Tedis, sementara wawancara melibatkan interaksi langsung dengan informan utama, termasuk pedagang dan pihak terkait, guna menggali informasi mendalam tentang pengalaman, tantangan, dan persepsi mereka terhadap kebijakan pembangunan inklusif. Teknik dokumentasi meliputi pengumpulan foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan. Data dianalisis menggunakan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2002). Dengan analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pembangunan inklusif dapat menjadi solusi dalam mengurangi peminggiran sosial di wilayah perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Inklusif dan Pengurangan Eksklusi Sosial di Kota Kupang

Pembangunan inklusif berfokus pada pemerataan akses terhadap kesempatan sosial, ekonomi, dan politis bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu, dengan penekanan pada pemberdayaan kelompok marginal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kupang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya, pembangunan inklusif tidak hanya sekadar tentang meningkatkan fasilitas fisik, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam merancang kebijakan yang dapat memberikan akses yang adil kepada mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sundaryanto (2019), yang menekankan bahwa pembangunan inklusif berperan penting dalam pengurangan ketimpangan sosial, melalui pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PKL mendapat ruang untuk berkembang dengan pemberian akses yang adil terhadap fasilitas umum dan perlindungan sosial.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Kupang adalah bagaimana mengintegrasikan sektor informal, seperti PKL, dalam sistem pembangunan yang lebih luas tanpa menimbulkan ketimpangan. Meskipun PKL memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, mereka sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan kota yang lebih formal. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali dan Son (2007), keberhasilan pembangunan inklusif sangat tergantung pada menciptakan lapangan kerja yang produktif dan memberikan akses yang setara kepada semua warga negara, termasuk sektor informal seperti PKL.

Dengan melihat konteks Kota Kupang, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan

fisik, tetapi juga memperhatikan sektor informal. Pemerintah kota perlu lebih mengakomodasi keberadaan PKL dalam proses pembangunan agar mereka tidak merasa terpinggirkan, tetapi justru menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penyediaan ruang usaha yang layak bagi PKL serta dukungan terhadap pengembangan usaha mereka melalui pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan akan mendorong mereka untuk berkembang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memperkuat ekonomi lokal.

Eksklusi Sosial: Dampak Pembangunan Terhadap PKL di Kota Kupang

Eksklusi sosial, yang mengacu pada peminggiran kelompok dari akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang, merupakan salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan kota yang cepat. Dalam konteks PKL di Kota Kupang, eksklusi sosial sering kali muncul akibat keterbatasan ruang usaha dan regulasi yang tidak mengakomodasi sektor informal. Seperti yang dijelaskan oleh Sari (2020), peminggiran sosial ini sering terjadi akibat ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang setara. Eksklusi ini menyebabkan ketimpangan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan, termasuk PKL.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun PKL berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal, mereka sering kali tidak diakui dalam perencanaan kota dan hanya memiliki akses terbatas terhadap fasilitas publik yang memadai. Mereka berjualan di tempat yang tidak teratur, seringkali di trotoar atau jalanan yang mengganggu kenyamanan publik dan berisiko tinggi terhadap penggusuran oleh pemerintah kota. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana PKL merasa terpinggirkan meskipun mereka

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Sebagaimana diungkapkan oleh Todaro (2007), pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tidak terisolasi dalam masyarakat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus Pantai Tedis, PKL tidak sepenuhnya mengalami eksklusi sosial. Pemerintah Kota Kupang melalui kebijakan Kelurahan LLBK telah memberikan izin untuk berjualan dan menyediakan fasilitas seperti keamanan dan kebersihan bagi mereka. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, PKL bisa dilibatkan dalam pembangunan kota tanpa merasa terpinggirkan, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sebagai hasilnya, PKL di Pantai Tedis merasa didukung dan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka, meskipun tantangan terkait cuaca dan musim tetap mempengaruhi pendapatan mereka.

Pendekatan Pembangunan Inklusif: Integrasi PKL dalam Pembangunan Kota

Pendekatan pembangunan inklusif yang diadopsi oleh pemerintah Kota Kupang mencerminkan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk PKL. Salah satu aspek utama dari pembangunan inklusif adalah pengakuan terhadap kontribusi ekonomi sektor informal dan integrasi mereka ke dalam sistem sosial yang lebih luas. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa PKL di Pantai Tedis telah diberikan ruang untuk berjualan yang terorganisir, dengan penyediaan fasilitas dasar seperti penerangan dan kebersihan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan layak bagi PKL berjualan, tanpa mengganggu kenyamanan publik dan menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut teori pembangunan inklusif yang dijelaskan oleh Ali dan Son (2007), pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Pemberdayaan ini mencakup akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta perlindungan sosial yang memastikan bahwa sektor informal seperti PKL tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan kepada PKL di Pantai Tedis sudah memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi mereka. Meskipun mereka tidak diharuskan untuk membayar biaya sewa lahan atau pajak, mereka tetap dikenakan biaya kebersihan dan penerangan, yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan tempat usaha mereka.

Pembangunan inklusif yang melibatkan PKL dalam perencanaan kota juga memberikan keuntungan sosial dan ekonomi yang besar. Keberadaan PKL di sekitaran Pantai Tedis menciptakan peluang bagi pengunjung untuk menikmati makanan lokal yang murah dan khas, sementara PKL mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keikutsertaan PKL dalam kegiatan pembangunan ini, meskipun tidak formal, menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, pembangunan kota dapat dilakukan dengan cara yang inklusif dan menguntungkan semua pihak.

Pembangunan di Kota Kupang perlu dilaksanakan dengan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk PKL, sebagai bagian penting dari perekonomian kota. Pemerintah Kota Kupang melalui kebijakan yang diterapkan di Pantai Tedis telah menunjukkan bahwa PKL bisa dilibatkan dalam pembangunan tanpa terpinggirkan. Penyediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang usaha yang layak dan akses terhadap perlindungan sosial, memberikan peluang besar bagi PKL untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi kota.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mubyarto (2000), pembangunan yang inklusif berorientasi pada penciptaan keadilan sosial, yang memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di Kota Kupang, kebijakan yang mendukung PKL dalam perencanaan kota menciptakan lingkungan yang lebih adil, di mana mereka tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga menikmati manfaat dari pembangunan yang merata. Pemerintah perlu terus melibatkan PKL dalam kebijakan yang berkaitan dengan ruang kota dan pembangunan ekonomi, agar tercipta kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat.

Penutup

Simpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pembangunan inklusif dalam mereduksi eksklusi sosial, khususnya bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Tedis, Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKL sering kali terpinggirkan dalam pembangunan perkotaan, pendekatan pembangunan inklusif yang melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan kota dapat mengurangi ketimpangan sosial. Pembangunan yang melibatkan PKL dalam hal penyediaan fasilitas, pemberian izin usaha, serta akses terhadap keamanan dan kebersihan telah membantu menciptakan keseimbangan antara pengembangan kota dan kebutuhan PKL. Pendekatan ini memungkinkan PKL untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian kota tanpa merasa terpinggirkan.

Saran

- 1) Pemberian Surat Izin Usaha: PKL di Pantai Tedis sebaiknya diberikan surat izin usaha yang jelas. Ini akan memudahkan mereka dalam mengakses

bantuan dan mencegah praktik kecurangan atau pemindahan usaha secara sepihak dari pihak luar.

- 2) Peningkatan Akses ke Pelatihan dan Modal: Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan yang lebih baik bagi PKL untuk meningkatkan kualitas usaha mereka, sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.
- 3) Kebijakan yang Lebih Mendukung: Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan mendukung keberadaan PKL, seperti penyediaan ruang usaha yang layak dan fasilitas yang mendukung untuk keberlanjutan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Son, M. (2007). Inclusive Development and Economic Growth. *Journal of Development Economics*.
- Ardiansyah, I., & Rahmawati, T. (2018). Peran PKL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Sosial*.
- Bogdan, R., & Taylor, S. (2007). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. Wiley & Sons.
- Bungin, B.(2007). *Sosiologi Pedesaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan, F. (2021). Pembangunan Inklusif dan Partisipasi PKL dalam Proses Pembangunan Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Fadilah, R. (2022). Dampak Sosial dan Ekonomi PKL di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Kota Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi*.
- Hart, T. B. (1994). *The Political Economy of Urban Development in Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Idrus, D. (2009). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Lexy J. Moleong (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.(2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, S. (2000). *Pembangunan Ekonomi dan Keadilan Sosial: Pengantar untuk Membangun Masyarakat yang Berkeadilan*. Jakarta: LP3ES.
- Sari, A. (2020). Peminggiran Sosial di Wilayah Perkotaan: Penyebab dan Solusi. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Sugiyono, M. (2028). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, S. 2019. Peran PKL dalam Pembangunan Ekonomi Informal di Kota Kupang. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*.
- Sukoco, S. 2020. Pembangunan Inklusif dalam Meningkatkan Kesejahteraan PKL di Perkotaan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*.
- Silver, H., & Miler, A. 2010. *Social Exclusion: Theories and Practices*. Routledge.
- Susanti, N., & Hadi, S. 2019. Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Kota*.
- Tahir, M., & Hidayat, W. 2020. Peran Pedagang Kaki Lima dalam Perekonomian Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Thomas, B. Hart.1994. *Pembangunan Kota dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Todaro, M. P. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.